



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 144 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### Pasal 2

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun lalu.

#### Pasal 4

- (1) Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN,
  - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
  - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
  - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
  - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menyusun RKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 144

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 144 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2024 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renja DISPERINDAG, sebagai arahan kebijakan perencanaan satu tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen Renja DISPERINDAG harus selaras dengan Renstra DISPERINDAG Tahun 2024-2026 dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renja DISPERINDAG dan Restra DISPERINDAG, DISPERINDAG melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renja DISPERINDAG dilakukan satu bulan setelah penetapan RKPD Tahun 2024.

Adapun tahapan penyusunan Renja DISPERINDAG meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum DISPERINDAG/lintas Renja DISPERINDAG, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja.

Renja DISPERINDAG memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap DISPERINDAG yang disusun berpedoman kepada RKPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renja berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renja DISPERINDAG Tahun 2024 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DISPERINDAG Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2024 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023

## **RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Rencana kerja Anggaran disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; SE Kepmendagri No 906/2114/SJ ttg Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK TA 2022, DBHCHT TA 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes; Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; serta Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 150 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana kerja Anggaran Perangkat Daerah merupakan rencana pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan yang ada pada Renstra Perangkat Daerah, serta berpedoman pada RPJMD Pemerintah Daerah serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggung jawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan fokus "**Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Pemerintahan**".

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/ M-DAG/ PER/ 8/ 2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Pasuruan Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan;

26. Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Anggaran adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dibidang Perindustrian Dan Perdagangan untuk jangka waktu satu tahun mendatang, dalam rangka mendukung tujuan pembangunan lima tahun yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran adalah :

1. Rencana Kerja Anggaran disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Rencana Kerja Anggaran digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai tahap awal untuk dijadikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah tahunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pasuruan terfokus kepada 4 (empat) hasil yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Produktifitas Sektor Industri Pengolahan, Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Meningkatnya Perlindungan Konsumen, dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran Belanja Langsung (BL) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari 2 (dua) jenis urusan, yang pertama Urusan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 69.725.736.896,00 terealisasi s/d Trib. I sebesar Rp. 263.649.110,00 atau 37,81%. Sedangkan yang kedua Urusan Perdagangan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 6.121.943.507,00 terealisasi s/d Trib. I sebesar Rp. 360.839.888,00 atau 5,89% sedangkan Urusan Rutin/ Sekretariat sebesar Rp. 18.865.846.668,00 dan terealisasi s/d Trib. I sebesar Rp. 3.366.830.746,00 atau 17,85%. Dengan total anggaran keseluruhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 94.713.527.071,00 terealisasi s/d Trib. I sebesar Rp. 3.991.319.744,00 atau 4,21%.

Dalam hal ini ukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❖ Ukuran keberhasilan pencapaian Urusan Perindustrian pada Misi I Tahun 2023 dapat dijelaskan ke dalam indikator yaitu :
  - a) Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan yang dipertanggung jawabkan oleh Bidang Industri dengan target sebesar 73.298.992,1 dan terealisasi sebesar n/a atau n/a%, hasil belum dapat diketahui dikarenakan masih belum memperoleh data dari BPS Kab. Pasuruan atau tahap rekomendasi. Dalam meningkatkan pertumbuhan Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan telah melakukan upaya-upaya terhadap IKM antara lain :
    1. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan IKM untuk meningkatkan nilai tambah produksi
    2. Memfasilitasi IKM agar lebih berdaya saing melalui program/kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan

3. Menumbuhkan IKM wirausaha baru melalui pelatihan dan pembinaan, serta program Satrya Emas melalui pendataan dan pendampingan UMKM, meliputi :
    - Fasilitasi peningkatan ketrampilan bagi UMKM untuk mendapatkan pelatihan dan peningkatan ketrampilan
    - Fasilitasi Perijinan legalitas Produk UMKM sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda daftar Perusahaan (TDP), dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
    - Fasilitasi peningkatan pemasaran produk UMKM dalam bentuk online dan konvensional
    - Pendampingan untuk peningkatan kualitas manajemen pengelolaan usaha UMKM.
  - b) Nilai Perdagangan Besar dan Eceran yang dipertanggung jawabkan pada Bidang Perdagangan dengan target sebesar 9.797.862,3 dan terealisasi sebesar n/a atau n/a% dikarenakan masih belum memperoleh data dari BPS Kab. Pasuruan atau tahap rekomendasi.
  - c) Nilai Sakip OPD yang diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Kab. Pasuruan dengan target sebesar 84,00 terealisasi sebesar n/a atau n/a%.
- ❖ Ukuran keberhasilan pencapaian Urusan Perdagangan pada Misi V Tahun 2022 dapat dijelaskan ke dalam 2 (dua) indikator yaitu :
- a) Nilai Transaksi Perdagangan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 126,48% dibandingkan tahun 2022 dengan target sebesar Rp. 3.242.085,3 (Jutaan Rupiah) dan telah terealisasi pada Trib I sebesar Rp. 815.315,6 (Jutaan Rupiah) atau 25,15%. Hasil perolehan transaksi berasal dari omzet pelaksanaan kegiatan pameran yaitu pasar murah, gelar produk, misi dagang dan promosi dagang, baik lokal, regional, dan nasional serta omzet 14 pedagang pasar rakyat di Kab. Pasuruan. Berikut tabel kegiatan pasar murah, gelar produk, misi dagang, promosi dagang dan omzet pedagang pasar di Kab. Pasuruan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan di Trib I :

NO	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	LOKASI	NAMA PESERTA	OMSET
1	01 - 05 MARET 2023	PAMERAN INACRAFT	JCC - JAKARTA	IKM FERY	85.000.000
				IKM ANTOK	87.000.000
				BU FAT	25.000.000
2	08 - 12 MARET 2023	PAMERAN BATIK BORDIR DAN AKSESORIS FAIR	GRANDCITY SURABAYA	IKM MASNIA	26.933.000
				IKM YULI ASNANIK / BU NURITA	925.000
3	13 MARET 2023	PAMERAN BAKORWIL	PENDOPO KAB.PASURUAN	IKM BU SUSI KRISNA	12.000.000
				IKM MAKMIN	8.000.000
4	29 MARET 2023	BAZAR RAMADHAN	PENDOPO KAB.PASURUAN	IKM SANJAYA	3.135.000
5	TRIB I	OMSET UNIT PASAR	Nguling		27.547.199.820
			Grati		1.215.000.000
			Winongan		12.943.798.920
			Gd. Wetan		19.470.596.310
			Wrg Dowo		9.443.160.360
			Pasrepan		6.931.946.340
			Wonorejo		24.294.363.120
			Ngempit		6.196.008.780
			Bangil		456.498.720.000
			Purwosari		4.346.010.000
			Pandaan		24.285.597.840
			Prigen		20.158.200.000
			Sukorejo		11.815.945.290
			Gempol		185.204.700.000
			Cheng Hoo		4.716.398.700
<b>OMSET TRIB. I</b>					<b>815.315.638.480</b>

- b) Indikator persentase alat ukur yang terstandarisasi diukur dari hasil jumlah wajib tera ulang pemilik alat ukur/ pengguna alat ukur yang berada di kecamatan, pasar rakyat, SPBU, perusahaan/ pabrik dan tera secara mandiri di kabupaten pasuruan. Pelayanan tera tera ulang ini untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran hasil pengukuran serta jaminan hukum atas penggunaan alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal melalui kegiatan standarisasi dlm pelayanan tera dan tera ulang. Pada tahun 2023 target UTTP bidang metrologi legal sebesar 10.150 dan terealisasi sebesar 2.518 atau 24,81% dari target tahun 2023 sebesar 100%.

Evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Pasuruan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2021</b>										
<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>										
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM baru yang terbina		0,62						
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase pertumbuhan IKM Baru		8,15						
3.31.02.2.01.03	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang didampingi Satrya Emas		45						
		Jumlah Informasi perencanaan pembangunan industri		1						
3.31.02.2.01.04	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM kimia, tekstil, dan aneka yang difasilitasi		30						
		Jumlah IKM logam, mesin, alat transportasi dan elektronika yang difasilitasi		60						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM agro baru yang dibina		60						
		Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3,04						
<b>3.30.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupatere/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>94,30</b>						
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang		94,46						
3.30.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, air, telepon dan internet selama 12 bln		54						
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum		99,48						
3.30.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		34						
3.30.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian bahan logistik kantor		40						
3.30.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan		28						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.01.2.06.08	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat		1.470						
3.30.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		107						
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		98,59						
3.30.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		82						
3.30.01.2.02.03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa		31						
3.30.01.2.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan		237						
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja		88,41						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.01.2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja		4						
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian		1,82						
3.31.01.2.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi penegakan hukum		600						
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah		98,44						
3.30.01.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		2						
3.30.01.2.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		66						
3.30.01.2.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya		45						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>										
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase komoditi barang pokok dan barang penting yang terpantau		98,97						
3.30.04.2.02.02	- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah kegiatan pengawasan bapokting		14						
3.30.04.2.02.03	- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kegiatan pasar murah		1						
3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pupuk bersubsidi		74,21						
3.30.04.2.03.03	- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi		56						
<b>3.30.05</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Persentase Nilai Ekspor</b>		<b>0,95</b>						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)
3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nilai transaksi perdagangan		4,76						
3.30.05.2.01.02	- Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang nasional yang diikuti		2						
3.30.05.2.01.03	- Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran lokal yang diikuti		8						
3.30.05.2.01.04	- Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah keikutsertaan misi dagang produk unggulan		1						
<b>3.30.07</b>	<b>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase Jumlah IKM yang berhasil membuat MOU</b>		<b>91,37</b>						
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri		0,91						
3.30.07.2.01.02	- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kegiatan peningkatan kemitraan		10						
		Jumlah lokasi pembinaan PKL		6						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan		37,91						
		Persentase perusahaan eksportir yang dibina		3,60						
3.30.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase unit pasar yang terbina		27,20						
3.30.02.2.01.01	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Jumlah pedagang pasar yang dibina		50						
3.30.02.2.07	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase perusahaan yang mengajukan penerbitan SKA		3,60						
3.30.02.2.07.01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah kunjungan koordinasi ke perusahaan		9						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.03	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		16,14						
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang direvitalisasi		16,19						
3.30.03.2.01.01	- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarpras pasar rakyat yang akan direvitalisasi		243						
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase pedagang yang terbina		7,23						
3.30.03.2.02.01	- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang tertib dan tertata		130						
3.30.03.2.02.02	- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang mengajukan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan		125						
3.30.06	<b>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten</b>		98,46						



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang tertera		98,46						
3.30.06.2.01.01	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah layanan tera, tera ulang		10.101						
3.30.06.2.01.02	- Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan terhadap UTTP dan BDKT		1.000						
		Jumlah lokasi penyuluhan terhadap wajib tera ulang (WTU)		3						
<b>2022</b>										
<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>										
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM Olahan yang terbina			5,26	5,46	103,80			
		Persentase peningkatan IKM Kreatif yang terbina			9,01	9,21	102,22			
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan IKM olahan baru yang dibina			2	2,01	105,79			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase peningkatan IKM kreatif baru yang dibina			2	2,43	107,52			
3.31.02.2.01.02	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			2	1	50,00			
3.31.02.2.01.03	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			16	9	56,25			
3.31.02.2.01.04	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			1	1	100,00			
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang Tersedia			677	675	99,70			
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			2000	1950	97,50			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			11	11	100,00			
		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekontruksi Jalan			11	10	90,91			
		Panjang Jembatan yang dilakukan Rehabilitasi			1	1	100,00			
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			40	32	80,00			
3.30.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			100	106,03	106,03			
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang			100	100	100,00			
3.30.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12	12	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum			100	82,81	82,81			
3.30.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			3	3	100,00			
3.30.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			4	4	100,00			
3.30.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan			3	4	133,33			
3.30.01.2.06.08	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu			12	10	83,33			
3.30.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			112	90	80,36			
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan			100	102,29	102,29			
3.30.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			82	80	97,56			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.01.2.02.03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			12	12	100,00			
3.30.01.2.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			24	24	100,00			
3.30.01.2.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			6	6	100,00			
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja			100	99,98	99,98			
3.30.01.2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			7	7	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian			100	100	100,00			
3.31.01.2.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			50	50	100,00			
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100,00			
3.31.01.2.07.11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			3	3	100,00			
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan/ Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah			100	128,76	128,76			
3.30.01.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3	3	100,00			
3.30.01.2.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			80	86	107,50			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.01.2.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			80	121	151,25			
<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>										
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang harganya stabil			100	62,95	62,95			
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase komoditi barang pokok dan barang penting yang terpantau			100	100	100,00			
3.30.04.2.02.02	- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan Perdagangan			22	21	95,45			
3.30.04.2.02.03	- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota			1	2	200,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pupuk bersubsidi			100	100	100,00			
3.30.04.2.03.03	- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%			10	16	160,00			
<b>3.30.05</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Persentase Nilai Ekspor</b>			<b>100</b>	<b>109,91</b>	<b>109,91</b>			
3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nilai transaksi promosi dagang melalui pameran dan misi dagang			100	89,61	89,61			
3.30.05.2.01.01	- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina			0	0	-			
3.30.05.2.01.06	- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina			0	0	-			
3.30.05.2.01.02	- Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional			4	4	100,00			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.05.2.01.03	- Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal			60	78	130,00			
3.30.05.2.01.04	- Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan			2	2	100,00			
<b>3.30.07</b>	<b>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase IKM yang berhasil membuat MOU Pemesanan</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100,00</b>			
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase transaksi pemasaran SRG/ PKL dan kemitraan gapoktan			100	71,42	71,42			
3.30.072.01.02	- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			100	140	140,00			
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan			5	4,83	96,60			
		Persentase Perusahaan Eksportir yang dilina			18,03	19,31	107,10			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)
3.30.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelcaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase unit pasar yang terbina			7,14	7,14	100,00			
3.30.02.2.01.01	- Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik			1	1	100,00			
3.30.02.2.07	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase perusahaan yang mengajukan penerbitan SKA			8,59	8,59	100,00			
3.30.02.2.07.01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan surat keterangan asal			2701	2302	85,23			
<b>3.30.03</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>			
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik			0,25	0,24	96,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.03.2.01.01	- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan			192	190	98,96			
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase pedagang yang terbina			15	26,53	176,87			
3.30.03.2.02.01	- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan			1	1	100,00			
3.30.03.2.02.02	- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan			800	534	66,75			
<b>3.30.06</b>	<b>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten</b>			<b>100</b>	<b>129,42</b>	<b>129,42</b>			
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang tertera			100	128,14	128,14			
3.30.06.2.01.01	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang			10100	12942	128,14			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.06.2.01.02	- Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina			1000	1072	107,20			
<b>2023</b>										
<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>										
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Kreatif yang Dilatih	100					100	96,74	96,74
		Persentase IKM Unggulan yang Dilatih	100					100	95,81	95,81
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Industri Kreatif yang diselesaikan	100					100	100	100,00
		Persentase Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Industri Olahan yang diselesaikan	100					100	100	100,00
3.31.02.2.01.02	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2					1	2	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02.2.01.03	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	16					16	15	93,75
3.31.02.2.01.04	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	86					86	82	95,35
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang Tersedia	800					800	750	93,75
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1000					1000	975	97,50
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	12					12	12	100,00
		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	13					13	13	100,00
		Panjang Jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	1					1	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	21					21	20	95,24
<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>										
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupatere/Kota	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik/Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik/Sesuai Regulasi	100					100	98,70	98,70
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100					100	99,15	99,15
3.30.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12					12	12	100,00
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100					100	98,78	98,78
3.30.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4					4	4	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Karitor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4					4	4	100,00
3.30.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4					4	4	100,00
3.30.01.2.06.08	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4					4	4	100,00
3.30.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	12					12	12	100,00
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100					100	97,89	97,89
3.30.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80					80	74	92,50
3.30.01.2.02.03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	24					24	24	100,00
3.30.01.2.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	24					24	24	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.01.2.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	58					58	58	100,00
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100					100	96,77	96,77
3.30.01.2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15					15	15	100,00
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100					100	99,23	99,23
3.31.01.2.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	55					55	55	100,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100					100	95,34	95,34
3.31.01.2.07.05	- Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	214					214	210	98,13
3.31.01.2.07.11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	22					22	22	100,00
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah kondisi baik	100					100	97,65	97,65
3.30.01.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6					6	6	100,00
3.30.01.2.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	80					80	78	97,50
3.30.01.2.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80					80	75	93,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang harganya stabil	18,52					18,52	17,56	94,82
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase komoditi barang pokok dan barang penting yang terpantau	100					100	100	100,00
3.30.04.2.(12.02	- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan Perdagangan	12					12	12	100,00
3.30.04.2.(12.03	- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	2					2	2	100,00
3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pupuk bersubsidi	100					100	100	100,00
3.30.04.2.(13.03	- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12					12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+8)	11=(10/4)
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Transaksi Perdagangan	100					100	98,79	98,79
3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang dilaksanakan	100					100	100	100,00
3.30.05.2.(1.01	- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	50					100	40	80,00
3.30.05.2.(1.06	- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	50					50	50	100,00
3.30.05.2.(1.02	- Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional	6					6	6	100,00
3.30.05.2.(1.03	- Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	30					30	30	100,00
3.30.05.2.(1.04	- Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	2					2	2	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Nilai Transaksi Hasil Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100					100	100	100,00
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100					100	100	100,00
3.30.072.C.1.02	- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	120					120	100	83,33
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan	4,67					4,67	4,32	94,63
		Persentase Perusahaan Eksportir Yang Terfasilitasi	21,74					21,74	20,98	96,60
3.30.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase unit pasar yang terbina	33,33					33,33	31,9	95,71

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+3)	11=(10/4)
3.30.02.2.01.01	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1					1	1	100,00
3.30.02.2.07	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan	Persentase perusahaan yang mengajukan penerbitan SKA	9,66					9,66	9,47	98,03
3.30.02.2.07.01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan surat keterangan asal	2728					2728	2715	99,52
<b>3.30.03</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Direvitalisasi</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>97,45</b>	<b>97,45</b>
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan peningkatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dilaksanakan	46,67					46,67	45,76	98,05
3.30.03.2.01.01	- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	86					86	70	81,40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+3)	11=(10/4)
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase pedagang yang terbina	5,00					5,01	4,90	98,00
3.30.03.2.(12.01	- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	5					5	4	80,00
3.30.03.2.(12.02	- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	500					500	442	88,40
<b>3.30.03</b>	<b>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten</b>	<b>92,27</b>					<b>92,27</b>	<b>91,89</b>	<b>99,59</b>
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang tertera	90,63					90,63	90,51	99,87
3.30.06.2.(11.01	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbangan, dan alat perlengkapan ditera ulang	10150					10150	10145	99,95
3.30.06.2.(11.02	- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	1000					1000	1000	100,00

Tabel 2.1.A  
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023

Program / Kegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	96,74%	Belanja bahan-bahan pelatihan menyesuaikan dengan harga riil di pasaran	Perencanaan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai penyerapan yang lebih tepat
	95,81%	Belanja bahan-bahan pelatihan menyesuaikan dengan harga riil di pasaran dan disesuaikan dengan harga lelang	Perencanaan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai penyerapan yang lebih tepat
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98,70%	Penyesuaian dengan kebutuhan rutin	Perencanaan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai penyerapan yang lebih tepat
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	94,82%	Disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan	Perencanaan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai penyerapan yang lebih tepat
Program Pengembangan Ekspor	98,79%	Menyesuaikan berdasarkan undangan invent pameran	Koordinasi dengan panitia penyelenggara pameran
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	98,74%	Belanja bahan-bahan sosialisasi menyesuaikan dengan harga riil di pasaran	Perencanaan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai penyerapan yang lebih tepat
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	94,53%	Belanja bahan-bahan sosialisasi menyesuaikan dengan harga riil di pasaran	Perencanaan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai penyerapan yang lebih tepat
	96,50%	Disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan	Perencanaan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai penyerapan yang lebih tepat
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	97,45%	Disesuaikan dengan harga lelang dan penunjukan langsung	Perencanaan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai penyerapan yang lebih tepat
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	99,59%	Belanja bahan-bahan sosialisasi menyesuaikan dengan harga riil di pasaran	Perencanaan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai penyerapan yang lebih tepat

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan mengalami berbagai permasalahan yang telah dilakukan dan berbagai upaya yang diharapkan menjadi solusi dalam jangka pendek, menengah dan panjang diantaranya :

- a. Munculnya kompetitor baru sebagai tujuan investasi seperti Banyuwangi dan Tuban dengan dibangunnya berbagai fasilitas seperti bandara, terminal kargo dan kemudahan dalam perijinan, selain pemain lama seperti Sidoarjo dan Mojokerto yang menyebabkan realisasi perkembangan industri, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi lebih rendah target RPJMD. Untuk memecahkan masalah yang bersifat kompleks menyangkut kerja sama antar sektor, maka telah dilakukan koordinasi dengan BAPPEDA untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Industri sehingga penyelesaian permasalahan akan lebih terencana, terukur dan terkoordinasi antar sektor dalam kurun waktu yang pasti. Dengan perencanaan yang baik diharapkan akan terbangun industri yang berkelanjutan dan terjadi

keseimbangan antar wilayah, mampu mengintegrasikan potensi Industri Kecil, Menengah, Besar dan masyarakat sekitarnya dan mengutamakan pemanfaatan potensi lokal;

- b. Menguatnya nilai dollar terhadap rupiah menyebabkan banyaknya industri yang berbahan baku impor mengalami kendala. Oleh karena itu terus menerus dilakukan pendampingan kepada IKMB agar melakukan efisiensi proses produksi dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada di sekitar sehingga produk akhir yang dihasilkan kompetitif di pasaran. Selain itu diadakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan IT untuk menghasilkan produk yang inovatif;
- c. Belum stabilnya ekonomi global berpengaruh terhadap pasar hasil industri sehingga banyak investor yang menahan diri untuk berinvestasi di sektor riil, karenanya terus didorong aktifitas di bidang industri kreatif yang mengandalkan ide dan gagasan orisinal. IKMB terus didorong untuk mampu melayani konsumen lokal dan merintis ekspor impor antar pulau. Di sisi lain terus disosialisasikan kepada masyarakat agar lebih mencintai produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya;
- d. Membanjirnya barang dari luar negeri dengan harga murah sebagai dampak dari pasar bebas telah mengurangi daya serap pasar produk lokal. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk memperpendek arus barang dan jasa untuk mengurangi biaya pengiriman sehingga produk sampai ke konsumen dengan harga yang kompetitif. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan pasar murah di kecamatan-kecamatan dan di Sentra Bordir untuk memperkenalkan produk lokal, membuka peluang pasar baru, menggalakkan cinta produk dalam negeri dan memperpendek rantai pemasaran;
- e. Melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat seperti daging sebagai dampak dari buruknya tata niaga dan kebijakan impor sapi hidup dan daging beku dari Australia mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan antisipasi pasar akan meningkatnya kebutuhan protein dari nabati dan produk perikanan. Untuk memantau kecukupan stok pangan dan fluktuasi harga sembako, maka setiap minggu dilakukan monitoring harga sembako dari 24 kecamatan. Pada saat harga sudah sangat memberatkan masyarakat maka Pemerintah Daerah melakukan operasi pasar dengan menjual sembako murah;
- f. Maraknya peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan tambahan non pangan telah membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu dilakukan pengawasan barang yang beredar di masyarakat untuk memastikan keamanan pangan baik dari bahan tambahan



berbahaya maupun dari makanan yang telah kedaluwarsa. Pengawasan dilakukan secara rutin selama 12 bulan setahun di 24 Kecamatan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di atas dapat dilihat pada Tabel berikut ini

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**  
**Kabupaten Pasuruan**

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<u>URUSAN PERINDUSTRIAN</u>											
1	Nilai Produktifitas Sektor Industri Pengolahan			69.808.563,9	73.298.992,1	72.486.250,1	75.140.995,8	68.682.592,6	70.031.504,5	72.587.354,2	76.587.354,2	
	<u>URUSAN PERDAGANGAN</u>											
1	Nilai Transaksi Perdagangan			4.700,0	4.900,0	3.242.185	3.242.285	4.751,8	4.800,0	3.242.214	3.245.246	
2	Prosentase Alat Ukur Yang Terstandarisasi			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<u>NON URUSAN</u>											
1	Nilai Sakip OPD			83,00	84,00	84,20	84,50	82,60	84,00	84,26	84,36	

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<u>URUSAN PERINDUSTRIAN</u>									
			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	4,00	4,55	5,00	6,00	9,88	5,00	5,00	6,00	
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk tunjangan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	30,00	30,00	30,00	50,00	30,00	30,00	30,00	50,00	
			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100	100	100	100	100	100	
			<u>URUSAN PERDAGANGAN</u>									
			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	90,00	91,67	92,73	93,18	129,42	92,27	92,55	93,12	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat, dan berdaya saing. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan PD dalam lingkup Provinsi Jawa Timur maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Kabupaten Pasuruan mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial dan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Dalam kurun waktu dua tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perindag. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian dan perdagangan masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Hal ini merupakan tantangan khususnya dalam upaya memenangkan kompetisi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN serta percaturan ekonomi global pada umumnya.

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang industri dan perdagangan yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya industri dan perdagangan di Kabupaten Pasuruan.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku IKM;
2. Masih kurangnya pemanfaatan energy terbarukan;
3. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan HKI;
4. Persaingan pasar global yang makin ketat sehingga perlu peningkatan promosi baik dalam maupun luar negeri;
5. Kurang optimalnya pembayaran retribusi pasar, dimana salah satu faktornya masih rendahnya kesadaran pedagang pasar dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi;
6. Sarana dan prasarana bangunan pasar belum seluruhnya layak/ representatif;

7. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tera / tera ulang;
8. Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM Penera.

Dengan adanya beberapa permasalahan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, maka bisa berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang sudah ditetapkan. Karena dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut diperlukan kerja keras dan anggaran yang cukup besar, sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim.

Dengan semua kekurangan dan keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tetapi sebagai tantangan untuk mendapatkan peluang yang sangat baik di masa depan. Beberapa usaha untuk meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi diantaranya :

1. Menghemat anggaran dalam kegiatan;
2. Terus berusaha meningkatkan pemasaran produk IKM;
3. Meningkatkan kualitas produk IKM;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar dengan berpedoman pada inovatif;
5. Menambah tenaga penera di Bidang Metrologi Legal;
6. Penataan PKL yang lebih baik.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD merupakan penjabaran rencana strategis kedalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD menjadi acuan dalam proses penyusunan RENJA dan RKA Perangkat Daerah dan menjadi dasar pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD.

Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka kepala daerah menyusun rancangan KUAP dan rancangan PPAS. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka tujuan dari sistem perencanaan adalah :

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 6) Mendukung Fokus Tahun 2024 Kabupaten Pasuruan adalah Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Pemerintahan.

Sehingga dalam proses perencanaan, setiap penyelenggara pemerintahan perlu menyusun PPAS yang merupakan tindak lanjut dari penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat di Tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Pasuruan**

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>URIJIAN PERDAGANGAN</b>										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Disperindag	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	20.627.492.900,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Disperindag	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik/Sesuai Regulasi	100%	23.231.492.900,00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Disperindag	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100%	195.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Disperindag	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100%	275.000.000,00	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	55.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	195.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	30.000.000,00	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	190.000.000,00	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Disperindag	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	16.702.492.900,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Disperindag	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	16.257.492.900,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80 org-bln	10.746.932.900,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80 org-bln	10.746.932.900,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	36 dok	5.715.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	36 dok	5.300.000.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	24 dok	175.560.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	24 dok	175.560.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD	58 laporan	65.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD	58 laporan	35.000.000,00	



NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Disperindag	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	155.000.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Disperindag	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	155.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	55 org	155.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	55 org	155.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Disperindag	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	925.000.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Disperindag	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	825.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	90.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	90.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	110.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	110.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	280.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	220.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	95.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	80.000.000,00	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	12 laporan	350.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	12 laporan	325.000.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Disperindag	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%	500.000.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Disperindag	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%	3.600.000.000,00	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	250.000.000,00	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	500.000.000,00	
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	50 unit	250.000.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	50 unit	250.000.000,00	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	2.500.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	250.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	100.000.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Disperindag	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	750.000.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Disperindag	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	750.000.000,00	

NO.	Rancangan Awal R/KPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	750.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	750.000.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Disperindag	Persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	1.400.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Disperindag	Persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	1.370.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	80 unit	650.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	80 unit	650.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	150.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	120.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	600.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	600.000.000,00	
2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Kab. Pasuruan	Persentase Peningkatan Hak Sewa Tempat Pasar dan Pusat Perbelanjaan Yang Menjadi Kewenangan	7,00%	150.000.000,00	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Kab. Pasuruan	Persentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan	5,02%	150.000.000,00	
			Persentase Perusahaan Eksportir Yang Dibina	3,73%	10.000.000,00		Kab. Pasuruan	Persentase Perusahaan Eksportir Yang Terfasilitasi	24,15%	10.000.000,00	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Pasuruan	Persentase unit pasar yang terbina	46,66%	150.000.000,00	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Pasuruan	Persentase unit pasar yang terbina	46,66%	150.000.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik		Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dok	150.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik		Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dok	150.000.000,00	
	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Kab. Pasuruan	Persentase Perusahaan yang mengajukan penerbitan SKA	10,15%	10.000.000,00	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Kab. Pasuruan	Persentase Perusahaan yang mengajukan penerbitan SKA	10,15%	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		Jumlah dokumen penerbitan surat keterangan asal	2.728 dok	10.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		Jumlah dokumen penerbitan surat keterangan asal	2.728 dok	10.000.000,00	
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pasuruan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	21%	4.400.000.000,00	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pasuruan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi	100%	4.000.000.000,00	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pasuruan	Persentase pembangun dan peningkatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dilaksanakan	46,66%	3.750.000.000,00	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pasuruan	Persentase pembangunan dan peningkatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dilaksanakan	46,66%	3.100.000.000,00	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana distribusi perdagangan	90 unit kios/los	3.750.000.000,00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana distribusi perdagangan	60 unit kios/los	3.100.000.000,00	
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Kab. Pasuruan	Persentase pedagang yang terbina	6,13%	650.000.000,00	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Kab. Pasuruan	Persentase pedagang yang terbina	6,13%	900.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	6 dok	50.000.000,00	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	2 dok	50.000.000,00	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	530 dok	600.000.000,00	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	500 dok	850.000.000,00	
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kab. Pasuruan	Persentase Jumlah Komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Yang Harganya Stabil	100%	240.000.000,00	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kab. Pasuruan	Persentase Jumlah Komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Yang Harganya Stabil	22,22%	240.000.000,00	
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase komoditi barang pokok dan barang penting yang terpantau	100%	220.000.000,00	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase komoditi barang pokok dan barang penting yang terpantau	100%	220.000.000,00	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	12 laporan	20.000.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	12 laporan	20.000.000,00	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 laporan	200.000.000,00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 laporan	200.000.000,00	
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pengawasan pupuk bersubsidi	100%	20.000.000,00	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pengawasan pupuk bersubsidi	100%	20.000.000,00	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12 laporan	20.000.000,00	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12 laporan	20.000.000,00	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Pengembangan Ekspor	Kab. Pasuruan	Persentase Nilai Ekspor	50%	1.145.000.000,00	Program Pengembangan Ekspor	Kab. Pasuruan	Persentase Nilai Transaksi Perdagangan	100%	1.545.000.000,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang dilaksanakan	100%	1.145.000.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang dilaksanakan	100%	1.545.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	50 pelaku usaha	60.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	50 pelaku usaha	40.000.000,00	
	Pameran Dagang Nasional		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional	6 pelaku usaha	650.000.000,00	Pameran Dagang Nasional		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional	30 pelaku usaha	1.150.000.000,00	
	Pameran Dagang Lokal		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	30 pelaku usaha	300.000.000,00	Pameran Dagang Lokal		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	60 pelaku usaha	250.000.000,00	
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	2 pelaku usaha	75.000.000,00	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	4 pelaku usaha	75.000.000,00	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	30 pelaku usaha	60.000.000,00	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	30 pelaku usaha	30.000.000,00	
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Kab. Pasuruan	Persentase layanan tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten	100%	450.000.000,00	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Kab. Pasuruan	Persentase layanan tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten	92,73%	574.179.850,00	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Pasuruan	Persentase UTTP yang tertera	91,07%	450.000.000,00	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Pasuruan	Persentase UTTP yang tertera	91,07%	574.179.850,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	10.200 unit	250.000.000,00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	10.200 unit	324.179.850,00	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang Dibina	1.050 org	200.000.000,00	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang Dibina	1.050 org	250.000.000,00	
7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kab. Pasuruan	Persentase IKM yang berhasil membuat MKU pemesanan	25%	300.000.000,00	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kab. Pasuruan	Persentase Nilai Transaksi Hasil Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%	300.000.000,00	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100%	300.000.000,00	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100%	300.000.000,00	



NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	140 UMKM	300.000.000,00	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	140 UMKM	300.000.000,00	
<b>URISAN PERINDUSTRIAN</b>											
8	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kab. Pasuruan	Persentase Peningkatan IKM Olahan yang terbina	1,14%	62.953.817.741,00	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kab. Pasuruan	Persentase IKM Unggulan yang dilatih	100%	59.824.637.891,00	
			Persentase Peningkatan IKM Kreatif yang terbina	1,14%	1.600.000.000,00			Persentase IKM Kreatif yang dilatih	100%	1.560.000.000,00	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen penyusunan dan evaluasi rencana industri unggulan yang diselesaikan	100%	62.953.817.741,00	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen penyusunan dan evaluasi rencana industri unggulan yang diselesaikan	100%	59.824.637.891,00	
			Persentase dokumen penyusunan dan evaluasi rencana industri kreatif yang diselesaikan	100%	1.600.000.000,00			Persentase dokumen penyusunan dan evaluasi rencana industri kreatif yang diselesaikan	100%	1.560.000.000,00	
						Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	1 dok	150.000.000,00	

NO.	Rancangan Awal R/KPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	1 dok	1.000.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	1 dok	10.000.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	16 dok	1.600.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	16 dok	1.550.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	86 dok	60.253.817.741,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	86 dok	46.624.637.891,00	
Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia			800 unit			Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	800 unit				
Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara			1.000 m2			Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	1.000 m2				
Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala			12 titik lokasi			Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	12 titik lokasi				
Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan			13 titik lokasi			Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	13 titik lokasi				
Panjang Jembatan yang dilakukan Rehabilitasi			1 paket			Panjang Jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	1 paket				
Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun			1 titik lokasi			Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 titik lokasi				

NO.	Rancangan Awal R/KPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	4 dok	1.700.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	4 dok	3.050.000.000,00	
						Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 dok	10.000.000,00	
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri		Persentase IKM wajib IUI yang mempunyai Izin Usaha Industri	33,33%	40.000.000,00	
						Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase IKM yang mendapatkan rekomendasi izin melalui SIINas	100%	40.000.000,00	
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dok	20.000.000,00	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang industri di lingkup perizinan industri, perizinan perluasan industri. Perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri	1 dok	200.000.000,00	
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kab. Pasuruan	Persentase IKM yang terdata di SIINas	51,50%	400.000.000,00	
						Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IJKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase IKM yang telah mendapatkan sosialisasi SIINas	33,33%	400.000.000,00	
						Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Data Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dok	200.000.000,00	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dok	100.000.000,00	
						Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dok	100.000.000,00	
<b>Total Belanja Langsung ( BL )</b>					<b>91.876.310.641,00</b>					<b>91.876.310.641,00</b>	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan-usulan program, kegiatan masyarakat disampaikan melalui beberapa tahap, tahap awal melalui musrenbang tingkat Desa dilanjutkan tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Ditingkat perangkat daerah yang dilakukan adalah dengan melaksanakan forum perangkat daerah itu sendiri. Forum perangkat daerah ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan tiap tahun yang disesuaikan dengan renstra perubahan perangkat daerah itu sendiri.

Melalui musrenbang ditingkat Kabupaten para pemangku kebijakan yang terdiri atas pemegang kebijakan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten juga para tokoh masyarakat dan organisasi melaksanakan musyawarah dalam menyelaraskan usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak menyimpang dari renstra yang dimiliki perangkat daerah yang membidangi masing-masing kegiatan.

Dengan musrenbang ini diharapkan sasaran, lokasi kegiatan dan anggaran yang direncanakan terealisasi dengan tepat. Adapun hasil Musrenbang Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang telah disepakati antara lain :

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat;
- 2) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pasar Rakyat;
- 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia IKM melalui Pelatihan/Pembinaan keterampilan kewirausahaan;
- 4) Peningkatan dan Penumbuhan IKM;
- 5) Pemasaran Hasil IKM melalui (Pasar Lelang, Pameran dan Promosi Dagang);
- 6) Pembinaan/Penertiban PKL di 24 Kecamatan yaitu PKL Wisata, PKL Sekolah, PKL Cheng hoo Pandaan, PKL Sentra Kuliner Bangil, PKL Ex Pasar Hewan Purwosari)
- 7) Pelayanan Tera/tera Ulang terkait UTTP.

Dalam rencana kerja Tahun Anggaran 2024 disamping mengakomodir dari pemangku kepentingan melalui Musrenbang tahun 2023 juga akan mengevaluasi kembali usulan-usulan yang belum terakomodir hasil Musrenbang tahun 2022 yang mendukung fokus pembangunan tahun 2024. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan yang terakomodir pada Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Kabupaten Pasuruan**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi	100%	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase pembangunan dan peningkatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dilaksanakan	46,66%	
	- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kecamatan Kraton	Jumlah sarana distribusi perdagangan	3 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Ngempit
		Kecamatan Purwosari		4 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Purwosari
		Kecamatan Wonorejo		13 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Wonorejo
		Kecamatan Sukorejo		7 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Sukorejo
		Kecamatan Pandaan		4 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Pandaan
		Kecamatan Prigen		3 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Prigen
		Kecamatan Winongan		3 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Winongan
		Kecamatan Gondangwetan		2 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Gondangwetan
		Kecamatan Bangil		2 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Bangil
		Kecamatan Gempol		2 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Gempol
		Kecamatan Pasrepan		1 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Pasrepan
		Kecamatan Grati		1 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Grati
		Kecamatan Nguling		3 unit kios/los	Revitalisasi / rehabilitasi Unit Pasar Nguling

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	<b>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>		<b>Persentase Nilai Transaksi Hasil Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	100%	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100%	
	- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota	Kel.Pecalukan Kec.Prigen	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	60 UMKM	Sosialisasi pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
		Ds.Tambakan Kec.Bangil		60 UMKM	Sosialisasi pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
3	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</b>		<b>Persentase Jumlah Komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Yang Harganya Stabil</b>	22,22%	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota		Persentase komoditi barang pokok dan barang penting yang terpantau	100%	
	- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kecamatan Gempol	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	30 pelaku usaha	Gelar produk pameran dan pasar murah bagi IKM binaan (Aspirasi Rakyat)
4	<b>Program Perencanaan Dan Pembangunan industri</b>		<b>Persentase IKM Unggulan yang dilatih</b>	100%	
			<b>Persentase IKM Kreatif yang dilatih</b>	100%	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase dokumen penyusunan dan evaluasi rencana industri unggulan yang diselesaikan	100%	



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase dokumen penyusunan dan evaluasi rencana industri kreatif yang diselesaikan	100%	
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya industri	Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan IKM bagi pelaku usaha batik (Aspirasi Rakyat)
		Desa Cukurguling Kecamatan Lumbang		1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan IKM bagi pelaku usaha perbengkelan otomotif R2/R4 (Aspirasi Rakyat)
		Kec. Pasrepan		1 dok	Pelatihan promosi perdagangan dengan menggunakan media sosial dan elektronik (Aspirasi Rakyat)
		Ds.Luwuk Kec.Kejayan		1 dok	Pelatihan promosi perdagangan dengan menggunakan media sosial dan elektronik
		Ds.Luwuk Kec.Kejayan		1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan iKM bagi pelaku usaha perbengkelan otomotif R2/R4
		Ds.Tanggulangin Kec.Kejayan		1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan IKM bagi pelaku usaha perbengkelan otomotif R2/R4
		Kel.Kejayan Kec.Kejayan		1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan IKM bagi pelaku usaha perbengkelan otomotif R2/R4
		Ds.Susukanrejo Kec.Pohjentrek		1 dok	Pelatihan promosi perdagangan dengan menggunakan media sosial dan elektronik

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dsn.Kertosari Kec.Purwosari		1 dok	Pelatihan promosi perdagangan dengan menggunakan media sosial dan elektronik
		Ds.Kertosari Kec.Purwosari		1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan IKM bagi pelaku usaha perbengkelan otomotif R2/R4
		Ds.Sengonagung Kec.Purwosari		1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan IKM bagi pelaku usaha perbengkelan otomotif R2/R4
		Dsn.Tamansari Kec.Wonorejo		1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan IKM bagi pelaku usaha perbengkelan otomotif R2/R4
		Ds.Petungsari Kec.Pandaan		1 dok	Pelatihan promosi perdagangan dengan menggunakan media sosial dan elektronik
		Kecamatan Pandaan		1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan IKM bagi pelaku usaha konveksi (pembuatan karpet enceng gondok)
		Kel.Dermo Kec.Bangil		1 dok	Pelatihan promosi perdagangan dengan menggunakan media sosial dan elektronik
		Ds.Ngatungan Kec.Pasrepan		1 dok	Pelatihan promosi perdagangan dengan menggunakan media sosial dan elektronik
		Dsn.Krajan Kec.Pasrepan		1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan IKM bagi pelaku usaha pengolahan logam

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ds.Petung Kec.Pasrepan		1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan IKM bagi pelaku usaha perbengkelan otomotif R2/R4
		Dsn.Krikilan Kel.Gratitunon Kec.Grati		1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan IKM bagi pelaku usaha perbengkelan otomotif R2/R4
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Desa Wonosari Kecamatan Tukur	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 dok	Pelatihan keterampilan IKM bagi pelaku usaha olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (Aspirasi Rakyat)
		Desa Legok Kecamatan Gempol		1 dok	Pelatihan keterampilan IKM bagi pelaku usaha olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (Aspirasi Rakyat)
		Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi		1 dok	Pelatihan keterampilan IKM bagi pelaku usaha olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (Aspirasi Rakyat)
		Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi		1 dok	Pelatihan keterampilan IKM bagi pelaku usaha olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (Aspirasi Rakyat)
		Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi		1 dok	Pelatihan keterampilan IKM bagi pelaku usaha olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (Aspirasi Rakyat)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ds.Sengonagung Kec.Purwosari		1 dok	Pelatihan keterampilan IKM bagi pelaku usaha olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan
		Dsn.Jeruk Purut Kec.Gempol		1 dok	Pelatihan keterampilan IKM bagi pelaku usaha olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan
		Dsn.Jeruk Purut Kec.Gempol		1 dok	Pelatihan peningkatan keterampilan IKM bagi pelaku usaha konveksi
		Ds.Kapasan Kec.Nguling		1 dok	Pelatihan keterampilan IKM bagi pelaku usaha olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Kabupaten Pasuruan bahkan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan Provinsi Jawa Timur meliputi Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong serta Digitalisasi dalam Pelayanan Publik yaitu Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata. Sedangkan Kebijakan Daerah meliputi Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Pemerintah yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi. Dan untuk Kebijakan (umum) Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan peningkatan ketrampilan IKM untuk mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi daerah Kab. Pasuruan;
2. Pemberian rekomendasi pengurusan TDP dan IUI;
3. Pelaksanaan dan pengawasan kemetrolagian daerah;
4. Pelaksanaan tera/ tera ulang kemetrolagian daerah;
5. Pemasaran produk IKM binaan;
6. Pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat;
7. Peningkatan kemitraan IKM dengan industri besar.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun depan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjadi fungsi/ bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selaras dengan fungsi/ bidang kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah

1. *"Meningkatnya Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Daerah"*.

Penjabaran di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 Memuat tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan adalah

- 1.1. *“Meningkatnya Produksi Sektor Industri Pengolahan “* dengan indikator kinerja tujuan yaitu *“Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan”*.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, maka ditetapkan sasaran strategis yang merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun dan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

- a) Meningkatkan Produktifitas Sektor Industri Pengolahan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Produktifitas Sektor Industri Pengolahan.

- 1.2. *“Meningkatnya Konsumsi Masyarakat”* dengan indikator kinerja tujuan yaitu *“Indeks Daya Beli Masyarakat”*

Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, maka ditetapkan sasaran strategis yang merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun dan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

- a) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Transaksi Perdagangan;
- b) Meningkatkan Perlindungan Konsumen dengan indikator kinerja sasaran yaitu Prosentase Alat Ukur Yang Terstandarisasi;
- c) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator Nilai SAKIP OPD.

Berikut tabel tujuan dan sasaran renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan :

**Tabel 3.2**  
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
<b>Tujuan 1 :</b> Meningkatkan Produktifitas Sektor-sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,41	6,03	3,51
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	6,98	7,34	-
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan	68.682.592,6	70.031.504,5	70.031.504,5
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	11.359.788,1	12.459.734,6	-
Sasaran 1.3 : Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	82,60	84,00	84,20
<b>Tujuan 2 :</b> Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Indeks Daya Beli	72,30	73,46	0,42
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Transaksi Perdagangan	4.751,8	4.900,0	3.242.185
Sasaran 2.2 : Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur yang Terstandardisasi	100	100	100

### 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Bupati SOTK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan memiliki 4 (empat) bidang antara lain : Bidang Pengembangan Perdagangan, Bidang Kemetrolgian, Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri, serta Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri. Dalam rencana kerja (Renja) Tahun 2024 terdapat 10 program, 19 kegiatan, dan 49 sub kegiatan. Untuk rencana pelaksanaan kegiatan hampir di semua wilayah Kabupaten Pasuruan dan juga diluar Kabupaten bahkan di luar Provinsi Jawa Timur. Jumlah pagu anggaran untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 91.876.310.641,00 yang terdiri dari 3 (tiga) sumber dana yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penyusunan Renja berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi OPD yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif. Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2024 ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Pada program/ kegiatan rencana kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung prioritas pembangunan/ revitalisasi pasar wisata cheng hoo-pandaan dan pembangunan gedung sarana prasarana bidang kemetrolgion. Berikut Program dan Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2024 adalah

- Indikator kinerja Nilai Produktifitas Sektor Industri Pengolahan yang diampuh oleh Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dan Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri terdiri atas :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Implementasi program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;*

b) *Koordinasi, Sinkronasi dan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;*

c) *Koordinasi, Sinkronasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat;*

d) *Koordinasi Sinkronasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri;*

e) *Koordinasi, sinkronasi, dan Pelakasaan Pembangunan Sumber Daya Industri;*

f) *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.*

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Implementasi program ini diwujudkan dalam kegiatan :



1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;*

b) *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota.*

### 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Implementasi program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);*

b) *Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas;*

c) *Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.*

• Indikator kinerja Nilai Transaksi Perdagangan yang diampuh oleh Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri atas :

#### 1. Program Pengembangan Ekspor

Implementasi program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota;*

b) *Pameran Dagang Nasional;*

c) *Pameran Dagang Lokal;*

d) *Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan;*

e) *Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor.*

#### 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Implementasi program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan*

2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;*

b) *Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.*

3. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Implementasi program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik.*

2) Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA*

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Implementasi program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan;*

b) *Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota.*

2) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.*

5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Implementasi program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota.*

- Indikator kinerja Prosentase Alat Ukur Yang Terstandarisasi yang diampuh oleh Bidang Kemetrolgian terdiri atas :

1. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Implementasi program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;*

b) *Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal.*

- Indikator kinerja Nilai Sakip OPD yang diampuh oleh Sekretariat/ Rutin terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Implementasi program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.*

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*

b) *Penyediaan Bahan Logistik Kantor;*

c) *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;*

d) *Fasilitas Kunjungan Tamu;*

e) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*

3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan antara lain :

a) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*

b) *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;*

c) *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;*

- d) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.*
- 4) *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*  
Dengan sub kegiatan antara lain :
  - a) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;*
  - b) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;*
  - c) *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.*
- 5) *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*  
Dengan sub kegiatan antara lain :
  - a) *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.*
- 6) *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*  
Dengan sub kegiatan antara lain :
  - a) *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
  - b) *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
  - c) *Pengadaan Mebel;*
  - d) *Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;*
  - e) *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*
- 7) *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*  
Dengan sub kegiatan antara lain :
  - a) *Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;*
  - b) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
  - c) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.*

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian**

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 2) Kode program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Tahunan OPD mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 4) Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 adalah Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Pemerintahan;
- 5) Program dan kegiatan yang direncanakan menampung usulan-usulan masyarakat lewat musrenbang Tahun Anggaran 2023.

#### **4.2. Rencana Tindak Lanjut**

- 1) Dukungan dari berbagai stakeholders untuk memberikan pemikiran, saran dan informasi agar dalam pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan OPD, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan acuan dalam perumusan rencana kerja tahunan yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga masyarakat dan swasta dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuh-kembangkan masyarakat yang mandiri dan demokratis,

sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai motivator dan fasilitator;

- 4) Penguatan daya tahan masyarakat terhadap pengaruh perubahan kondisi nasional dan regional dengan cara mengembangkan dan meningkatkan segala upaya bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Kabupaten Pasuruan, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 4**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Pasuruan**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.01	1. Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Kantor Disperindag	100%		23.232.492.900,00	DAU		100%	22.206.626.190,00
3.30.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kantor Disperindag	100%		275.000.000,00	DAU		100%	290.000.000,00
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Disperindag	10 dok		55.000.000,00			10 dok	60.000.000,00
					Belanja Operasi	55.000.000,00				
					Belanja pegawai	-				
					Belanja barang dan jasa	55.000.000,00				
					Belanja Bunga	-				
					Belanja subsidi	-				
					Belanja hibah	-				
					Belanja bantuan sosial	-				
					Belanja Modal	-				
					Belanja Tidak Terduga	-				
					Belanja Transfer	-				
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Disperindag	7 laporan		30.000.000,00	DAU		8 laporan	35.000.000,00
					Belanja Operasi	30.000.000,00				
					Belanja pegawai	-				
					Belanja barang dan jasa	30.000.000,00				
					Belanja Bunga	-				
					Belanja subsidi	-				
					Belanja hibah	-				
					Belanja bantuan sosial	-				
					Belanja Modal	-				
					Belanja Tidak Terduga	-				
					Belanja Transfer	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kantor Disperindag	1 laporan	190.000.000,00			1 laporan	195.000.000,00
					Belanja Operasi : 190.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 190.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
<b>3.30.1.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat</b>	<b>Kantor Disperindag</b>	<b>100%</b>	<b>16.257.492.900,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>17.396.626.190,00</b>
3.30.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kantor Disperindag	80 org-bh	10.746.932.900,00	DAU		64 org-bh	11.821.626.190,00
					Belanja Operasi : 10.746.932.900,00				
					Belanja pegawai : 10.746.932.900,00				
					Belanja barang dan jasa : -				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
3.30.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kantor Disperindag	36 dok	5.300.000.000,00	DAU		24 dok	5.350.000.000,00
					Belanja Operasi : 5.300.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 5.300.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.1.2.02.01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD)	Kantor Disperindag	24 dok		175.560.000,00	DAU	24 dok	185.000.000,00
					Belanja Operasi	: 175.560.000,00			
					Belanja pegawai	: 175.560.000,00			
					Belanja barang dan jasa	: -			
					Belanja Bunga	: -			
					Belanja subsidi	: -			
					Belanja hibah	: -			
					Belanja bantuan sosial	: -			
					Belanja Modal	: -			
					Belanja Tidak Terduga	: -			
Belanja Transfer	: -								
3.30.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kantor Disperindag	58 laporan		35.000.000,00	DAU	58 laporan	40.000.000,00
					Belanja Operasi	: 35.000.000,00			
					Belanja pegawai	: -			
					Belanja barang dan jasa	: 35.000.000,00			
					Belanja Bunga	: -			
					Belanja subsidi	: -			
					Belanja hibah	: -			
					Belanja bantuan sosial	: -			
					Belanja Modal	: -			
					Belanja Tidak Terduga	: -			
Belanja Transfer	: -								
3.30.1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Kantor Disperindag	100%		155.000.000,00	DAU	100%	160.000.000,00
3.30.1.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kantor Disperindag	55 org		155.000.000,00	DAU	60 org	160.000.000,00
					Belanja Operasi	: 155.000.000,00			
					Belanja pegawai	: -			
					Belanja barang dan jasa	: 155.000.000,00			
					Belanja Bunga	: -			
					Belanja subsidi	: -			
					Belanja hibah	: -			
					Belanja bantuan sosial	: -			
					Belanja Modal	: -			
					Belanja Tidak Terduga	: -			
Belanja Transfer	: -								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	Kantor Disperindag	100%	825.000.000,00	DAU		100%	880.000.000,00
3.30.1.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kantor Disperindag	4 paket	90.000.000,00	DAU		4 paket	90.000.000,00
					Belanja Operasi : 90.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 90.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
3.30.1.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kantor Disperindag	4 paket	110.000.000,00	DAU		4 paket	120.000.000,00
					Belanja Operasi : 110.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 110.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
3.30.1.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kantor Disperindag	4 paket	220.000.000,00	DAU		4 paket	230.000.000,00
					Belanja Operasi : 220.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 220.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.1.2.06.01	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kantor Disperindag	4 laporan	80.000.000,00	DAU		4 laporan	90.000.000,00
					Belanja Operasi : 80.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 80.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
3.30.1.2.06.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	Kantor Disperindag	12 laporan	325.000.000,00	DAU		12 laporan	350.000.000,00
					Belanja Operasi : 325.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 325.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
<b>3.30.1.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah</b>	<b>Kantor Disperindag</b>	<b>100%</b>	<b>3.600.000.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>1.250.000.000,00</b>
3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kantor Disperindag	1 unit	500.000.000,00	DAU		1 unit	550.000.000,00
					Belanja Operasi : -				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : -				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : 500.000.000,00				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3.30.1.2.07.04	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kantor Disperindag	50 unit	250.000.000,00	DAU		60 unit	300.000.000,00	
					Belanja Operasi					-
					Belanja pegawai					-
					Belanja barang dan jasa					-
					Belanja Bunga					-
					Belanja subsidi					-
					Belanja hibah					-
					Belanja bantuan sosial					-
					Belanja Modal					250.000.000,00
					Belanja Tidak Terduga					-
Belanja Transfer	-									
3.30.01.2.07.03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kantor Disperindag	10 unit	250.000.000,00	DAU		12 unit	300.000.000,00	
					Belanja Operasi					-
					Belanja pegawai					-
					Belanja barang dan jasa					-
					Belanja Bunga					-
					Belanja subsidi					-
					Belanja hibah					-
					Belanja bantuan sosial					-
					Belanja Modal					250.000.000,00
					Belanja Tidak Terduga					-
Belanja Transfer	-									
3.30.01.2.07.03	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kantor Disperindag	1 unit	2.500.000.000,00	DAU		-	-	
					Belanja Operasi					-
					Belanja pegawai					-
					Belanja barang dan jasa					-
					Belanja Bunga					-
					Belanja subsidi					-
					Belanja hibah					-
					Belanja bantuan sosial					-
					Belanja Modal					2.500.000.000,00
					Belanja Tidak Terduga					-
Belanja Transfer	-									

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.1.2.07.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		5 unit	100.000.000,00	DAU		6 unit	100.000.000,00
					Belanja Operasi	-			
					Belanja pegawai	-			
					Belanja barang dan jasa	-			
					Belanja Bunga	-			
					Belanja subsidi	-			
					Belanja hibah	-			
					Belanja bantuan sosial	-			
					Belanja Modal	100.000.000,00			
					Belanja Tidak Terduga	-			
					Belanja Transfer	-			
3.30.1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Kantor Disperindag	100%	750.000.000,00			100%	800.000.000,00
3.30.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kantor Disperindag	12 laporan	750.000.000,00	DAU		12 laporan	800.000.000,00
					Belanja Operasi	750.000.000,00			
					Belanja pegawai	-			
					Belanja barang dan jasa	750.000.000,00			
					Belanja Bunga	-			
					Belanja subsidi	-			
					Belanja hibah	-			
					Belanja bantuan sosial	-			
					Belanja Modal	-			
					Belanja Tidak Terduga	-			
					Belanja Transfer	-			
3.30.1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang milik daerah kondisi baik	Kantor Disperindag	100%	1.370.000.000,00	DAU		100%	1.430.000.000,00
3.30.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kantor Disperindag	80 unit	650.000.000,00	DAU		90 unit	700.000.000,00
					Belanja Operasi	650.000.000,00			
					Belanja pegawai	-			
					Belanja barang dan jasa	650.000.000,00			
					Belanja Bunga	-			
					Belanja subsidi	-			
					Belanja hibah	-			
					Belanja bantuan sosial	-			
					Belanja Modal	-			
					Belanja Tidak Terduga	-			
					Belanja Transfer	-			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kantor Disperindag	54 unit	120.000.000,00	DAU		50 unit	130.000.000,00
					Belanja Operasi : 120.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 120.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
Belanja Transfer : -									
3.30.1.2.09.05	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	Kantor Disperindag	3 unit	600.000.000,00	DAU		4 unit	600.000.000,00
					Belanja Operasi : 600.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 600.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
Belanja Transfer : -									
3.30.02	2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi	Kab. Pasuruan	5,02%	150.000.000,00	DAU		5,48%	175.000.000,00
		Persentase perusahaan eksportir yang terfasilitasi	Kab. Pasuruan	24,15%	10.000.000,00	DAU		26,57%	15.000.000,00
3.30.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase unit pasar yang terbina	Kab. Pasuruan	46,66%	150.000.000,00	DAU		60,00%	175.000.000,00
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Pasuruan	1 dok	150.000.000,00	DAU		1 dok	175.000.000,00
					Belanja Operasi : 150.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 150.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
Belanja Transfer : -									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
<b>3.30.02.2.07</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</b>	<b>Persentase perusahaan yang mengajukan penerbitan SKA</b>		<b>10,15%</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>10,63%</b>	<b>15.000.000,00</b>
3.30.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan surat keterangan asal	Kab. Pasuruan	2.728 dok		10.000.000,00	DAU		2.728 dok	15.000.000,00
					Belanja Operasi	10.000.000,00				
					Belanja pegawai	-				
					Belanja barang dan jasa	10.000.000,00				
					Belanja Bunga	-				
					Belanja subsidi	-				
					Belanja hibah	-				
					Belanja bantuan sosial	-				
					Belanja Modal	-				
					Belanja Tidak Terduga	-				
					Belanja Transfer	-				
<b>3.30.03</b>	<b>3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi</b>	Kab. Pasuruan	<b>100%</b>		<b>4.000.000.000,00</b>	<b>DAU / JBHCHT</b>		<b>100%</b>	<b>4.350.000.000,00</b>
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase pembangunan dan peningkatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dilaksanakan</b>	Kab. Pasuruan	<b>46,66%</b>		<b>3.100.000.000,00</b>	<b>DAU / JBHCHT</b>		<b>66,66%</b>	<b>3.275.000.000,00</b>
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Pasar Gondangwetan	60 unit kios/bos		3.100.000.000,00	DAU / JBHCHT		70 unit kios/bos	3.275.000.000,00
			Pasar Nguling		Belanja Operasi	600.000.000,00				
					Belanja pegawai	-				
					Belanja barang dan jasa	600.000.000,00				
					Belanja Bunga	-				
					Belanja subsidi	-				
					Belanja hibah	-				
					Belanja bantuan sosial	-				
					Belanja Modal	2.500.000.000,00				
					Belanja Tidak Terduga	-				
					Belanja Transfer	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase pedagang yang Terbina	Kab. Pasuruan	6,13%		900.000.000,00	DAU		5,70%	1.075.000.000,00
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Pasuruan	6 dok		50.000.000,00	DAU		3 dok	75.000.000,00
					Belanja Operasi	50.000.000,00				
					Belanja pegawai	-				
					Belanja barang dan jasa	50.000.000,00				
					Belanja Bunga	-				
					Belanja subsidi	-				
					Belanja hibah	-				
					Belanja bantuan sosial	-				
					Belanja Modal	-				
					Belanja Tidak Terduga	-				
					Belanja Transfer	-				
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Pasuruan	530 dok		850.000.000,00	DAU		500 dok	1.000.000.000,00
					Belanja Operasi	850.000.000,00				
					Belanja pegawai	-				
					Belanja barang dan jasa	850.000.000,00				
					Belanja Bunga	-				
					Belanja subsidi	-				
					Belanja hibah	-				
					Belanja bantuan sosial	-				
					Belanja Modal	-				
					Belanja Tidak Terduga	-				
					Belanja Transfer	-				
3.30.04	4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang harganya stabil	Kab. Pasuruan	22,22%		240.000.000,00	DAU		18,52%	270.000.000,00
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase komoditi barang pokok dan barang penting yang terpantau	Kab. Pasuruan	100%		220.000.000,00	DAU		100%	245.000.000,00



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Kab. Pasuruan	12 laporan	20.000.000,00	DAU		12 laporan	25.000.000,00
					Belanja Operasi : 20.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 20.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	2 laporan	200.000.000,00	DAU		2 laporan	220.000.000,00
					Belanja Operasi : 200.000.000,00				
					Belanja pegawai : 9.660.000,00				
					Belanja barang dan jasa : 190.340.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan pupuk bersubsidi	Kab. Pasuruan	100%	20.000.000,00	DAU		100%	25.000.000,00
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Kab. Pasuruan	12 laporan	20.000.000,00	DAU		12 laporan	25.000.000,00
					Belanja Operasi : 20.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 20.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.05	5. Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Transaksi Perdagangan	Kab. Pasuruan	100%		1.545.000.000,00	DAU		100%	1.640.000.000,00
3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang dilaksanakan	Kab. Pasuruan	100%		1.545.000.000,00	DAU		100%	1.640.000.000,00
3.30.05.2.01.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	Kab. Pasuruan	50 pelaku usaha		40.000.000,00	DAU		50 pelaku usaha	50.000.000,00
					Belanja Operasi	40.000.000,00				
					Belanja pegawai	-				
					Belanja barang dan jasa	40.000.000,00				
					Belanja Bunga	-				
					Belanja subsidi	-				
					Belanja hibah	-				
					Belanja bantuan sosial	-				
					Belanja Modal	-				
					Belanja Tidak Terduga	-				
					Belanja Transfer	-				
3.30.05.2.01.2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional	Kab. Pasuruan	30 pelaku usaha		1.150.000.000,00	DAU		30 pelaku usaha	1.170.000.000,00
					Belanja Operasi	1.150.000.000,00				
					Belanja pegawai	-				
					Belanja barang dan jasa	1.150.000.000,00				
					Belanja Bunga	-				
					Belanja subsidi	-				
					Belanja hibah	-				
					Belanja bantuan sosial	-				
					Belanja Modal	-				
					Belanja Tidak Terduga	-				
					Belanja Transfer	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3.30.05.2.01.C3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	Kab. Pasuruan	60 pelaku usaha		250.000.000,00	DAU		60 pelaku usaha	280.000.000,00
					Belanja Operasi	: 250.000.000,00				
					Belanja pegawai	: -				
					Belanja barang dan jasa	: 250.000.000,00				
					Belanja Bunga	: -				
					Belanja subsidi	: -				
					Belanja hibah	: -				
					Belanja bantuan sosial	: -				
					Belanja Modal	: -				
					Belanja Tidak Terduga	: -				
Belanja Transfer	: -									
3.30.05.2.01.C4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	Kab. Pasuruan	4 pelaku usaha		75.000.000,00	DAU		4 pelaku usaha	100.000.000,00
					Belanja Operasi	: 75.000.000,00				
					Belanja pegawai	: -				
					Belanja barang dan jasa	: 75.000.000,00				
					Belanja Bunga	: -				
					Belanja subsidi	: -				
					Belanja hibah	: -				
					Belanja bantuan sosial	: -				
					Belanja Modal	: -				
					Belanja Tidak Terduga	: -				
Belanja Transfer	: -									
3.30.05.2.01.C6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	Kab. Pasuruan	30 pelaku usaha		30.000.000,00	DAU		30 pelaku usaha	40.000.000,00
					Belanja Operasi	: 30.000.000,00				
					Belanja pegawai	: -				
					Belanja barang dan jasa	: 30.000.000,00				
					Belanja Bunga	: -				
					Belanja subsidi	: -				
					Belanja hibah	: -				
					Belanja bantuan sosial	: -				
					Belanja Modal	: -				
					Belanja Tidak Terduga	: -				
Belanja Transfer	: -									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.06	6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten	Kab. Pasuruan	92,73%	574.179.850,00	DAU		93,64%	624.179.850,00
3.30.06.2.0	1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang tertera	Kab. Pasuruan	91,07%	574.179.850,00	DAU		91,96%	624.179.850,00
3.30.06.2.01.C1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan di tera ulang	Kab. Pasuruan	10.200 unit	324.179.850,00	DAU		10.300 uni	374.179.850,00
					Belanja Operasi : 324.179.850,00				
					Belanja pegawai : 8.820.000,00				
					Belanja barang dan jasa : 315.359.850,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
3.30.06.2.01.C2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dilatih	Kab. Pasuruan	1.050 org	250.000.000,00	DAU		1.100 org	250.000.000,00
					Belanja Operasi : 250.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 250.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.07	7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Nilai Transaksi Hasil Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kab. Pasuruan	100%	300.000.000,00	DAU		100%	350.000.000,00
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kab. Pasuruan	100%	300.000.000,00	DAU		100%	350.000.000,00
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kab. Pasuruan	140 UMKM	300.000.000,00	DAU		140 UMKM	350.000.000,00
					Belanja Operasi : 300.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 300.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
3.31.02	8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Unggulan yang dilatih	Kab. Pasuruan	100%	59.824.637.891,00	DAU / DBHCHT / DAK		100%	62.464.637.891,00
		Persentase IKM Kreatif yang dilatih		100%	1.560.000.000,00	DAU		100%	1.660.000.000,00
3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen penyusunan dan evaluasi rencana industri unggulan yang diselesaikan	Kab. Pasuruan	100%	59.824.637.891,00	DAU / DBHCHT / DAK		100%	62.464.637.891,00
		Persentase dokumen penyusunan dan evaluasi rencana industri kreatif yang diselesaikan		100%	1.560.000.000,00	DAU		100%	1.660.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	Kab. Pasuruan	1 dok		150.000.000,00	DAU	1 dok	100.000.000,00
					Belanja Operasi	: 150.000.000,00			
					Belanja pegawai	: -			
					Belanja barang dan jasa	: 150.000.000,00			
					Belanja Bunga	: -			
					Belanja subsidi	: -			
					Belanja hibah	: -			
					Belanja bantuan sosial	: -			
					Belanja Modal	: -			
					Belanja Tidak Terduga	: -			
Belanja Transfer	: -								
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Kab. Pasuruan	1 dok		10.000.000.000,00	JBHCHT	1 dok	10.000.000.000,00
					Belanja Operasi	: 10.000.000.000,00			
					Belanja pegawai	: -			
					Belanja barang dan jasa	: 10.000.000.000,00			
					Belanja Bunga	: -			
					Belanja subsidi	: -			
					Belanja hibah	: -			
					Belanja bantuan sosial	: -			
					Belanja Modal	: -			
					Belanja Tidak Terduga	: -			
Belanja Transfer	: -								
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Kab. Pasuruan	16 dok		1.550.000.000,00	DAU	18 dok	1.650.000.000,00
					Belanja Operasi	: 1.550.000.000,00			
					Belanja pegawai	: 10.620.000,00			
					Belanja barang dan jasa	: 1.539.380.000,00			
					Belanja Bunga	: -			
					Belanja subsidi	: -			
					Belanja hibah	: -			
					Belanja bantuan sosial	: -			
					Belanja Modal	: -			
					Belanja Tidak Terduga	: -			
Belanja Transfer	: -								

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	
3.31.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Kab. Pasuruan	86 dok	46.624.637.891,00		DBHCHT		1 dok	49.764.637.891,00	
					Belanja Operasi	:					1.004.800.000,00
					Belanja pegawai	:					4.800.000,00
					Belanja barang dan jasa	:					1.000.000.000,00
					Belanja Bunga	:					-
					Belanja subsidi	:					-
					Belanja hibah	:					-
					Belanja bantuan sosial	:					-
					Belanja Modal	:					45.619.837.891,00
					Belanja Tidak Terduga	:					-
Belanja Transfer	:	-									
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kab. Pasuruan	4 dok	3.050.000.000,00		DAU / DAK		4 dok	2.600.000.000,00	
					Belanja Operasi	:					3.050.000.000,00
					Belanja pegawai	:					26.100.000,00
					Belanja barang dan jasa	:					3.023.900.000,00
					Belanja Bunga	:					-
					Belanja subsidi	:					-
					Belanja hibah	:					-
					Belanja bantuan sosial	:					-
					Belanja Modal	:					-
					Belanja Tidak Terduga	:					-
Belanja Transfer	:	-									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.31.02.2.01.03	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Kab. Pasuruan	1 dok	10.000.000,00	DAU		1 dok	10.000.000,00
					Belanja Operasi : 10.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 10.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
3.31.03	9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM wajib IUI yang mempunyai Izin Usaha Industri	Kab. Pasuruan	33,33%	40.000.000,00	DAU		66,67%	40.000.000,00
3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Persentase IKM yang mendapatkan rekomendasi izin melalui SIINas	Kab. Pasuruan	100%	40.000.000,00	DAU		100%	40.000.000,00
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Keesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab. Pasuruan	1 dok	20.000.000,00	DAU		1 dok	20.000.000,00
					Belanja Operasi : 20.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 20.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang industri dim lingkup perizinan industri, perizinan perluasan industri, Perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri	Kab. Pasuruan	1 dok	20.000.000,00	DAU		1 dok	20.000.000,00
					Belanja Operasi : 20.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 20.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
3.31.04	10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdata di SIINas	Kab. Pasuruan	51,50%	400.000.000,00	DAU		75,75%	400.000.000,00
3.31.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang telah mendapatkan sosialisasi SIINas	Kab. Pasuruan	33,33%	400.000.000,00	DAU		66,67%	400.000.000,00
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Data Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Pasuruan	1 dok	200.000.000,00	DAU		1 dok	200.000.000,00
					Belanja Operasi : 200.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 200.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Pasuruan	1 dok	100.000.000,00	DAU		1 dok	100.000.000,00
					Belanja Operasi : 100.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 100.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Pasuruan	1 dok	100.000.000,00	DAU		1 dok	100.000.000,00
					Belanja Operasi : 100.000.000,00				
					Belanja pegawai : -				
					Belanja barang dan jasa : 100.000.000,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
					91.876.310.641,00				
					Belanja Operasi : 40.156.472.750,00				
					Belanja pegawai : 10.982.492.900,00				
					Belanja barang dan jasa : 29.173.979.850,00				
					Belanja Bunga : -				
					Belanja subsidi : -				
					Belanja hibah : -				
					Belanja bantuan sosial : -				
					Belanja Modal : 51.719.837.891,00				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
					<b>TOTAL BELANJA PD : 91.876.310.641,00</b>				<b>94.195.443.931,00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

1. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN berdasarkan program, kegiatan sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.
2. Selanjutnya setelah Dokumen RENJA RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ditetapkan, menjadi pedoman DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan Anggaran) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN :
  - a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui kepala BAPPEDA (*Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).
  - b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF